



DPRD Yogya: Pengentasan Kemiskinan Melalui Perumahan

YOGYA (MERAPI) - Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat mengubah strategi pengentasan kemiskinan dengan melakukan intervensi di sektor perumahan dan transportasi umum untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

"Bisa dikatakan, warga miskin di Kota Yogyakarta sebenarnya masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sandang sehari-hari. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka menjadi tidak

mampu," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (30/1).

Menurutnya, penghasilan masyarakat di Kota Yogyakarta akan terserap cukup besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan, misalnya membayar sewa rumah kontrakan yang cukup tinggi. Selain itu, kondisi dan jaringan transportasi umum yang belum memadai membuat sebagian besar warga harus menyisihkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan transportasi dengan membeli kendaraan pribadi.

"Mau tidak mau, kendaraan pribadi yang seharusnya masuk kebutuhan

tersier berubah menjadi kebutuhan primer karena transportasi umum yang belum merata," terangnya.

Oleh karenanya, Krisnadi mengusulkan intervensi pengentasan kemiskinan yang pada awalnya lebih banyak diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat diubah untuk penyediaan perumahan yang terjangkau melalui rumah susun sewa dan peningkatan jaringan transportasi umum. "Memang ada kendala pada keterbatasan anggaran karena akan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi masih bisa disiasati dengan memanfaatkan Dana Keistimewaan," katanya.

Dana Keistimewaan yang hingga saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pekerjaan fisik mempercantik

wajah kota seperti revitalisasi pedestrian atau bangunan cagar budaya bisa dialihkan untuk pemenuhan perumahan dan transportasi. "Dengan demikian, beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan transportasi bisa ditekan sehingga persentase warga miskin di Yogyakarta bisa terus diturunkan," katanya.

Berdasarkan data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Yogyakarta hasil verifikasi pada 2022, jumlah warga miskin 17.451 kepala keluarga (KK) atau naik 1.641 KK dibandingkan dengan data 2020 sebanyak 15.810-KK, sedangkan berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2022 turun 1,07 persen menjadi 6,62 persen dibandingkan dengan 2021 yang berada pada kisaran 7,69 persen. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005